

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Pengaruh *Environmental Management System* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Berdasarkan tabel 4.11 bahwa hasil pengujian *Environmental Management System* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t statistik 14,87862 dapat disimpulkan bahwa *Environmental Management System* (EMS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Artinya hipotesis pertama yang menyatakan *Environmental Management System* berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* diterima artinya semakin baik *Environmental management system* sebuah perusahaan maka semakin tinggi melakukan pengungkapan emisi karbonnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aini dan Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa penerapan sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Nilai t-statistik yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa implementasi sistem manajemen lingkungan yang terstruktur merupakan prediktor yang sangat kuat dalam mendorong transparansi pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian Dewi & Dewi (2024) menunjukkan efek positif dan signifikan dari EMS terhadap carbon emission disclosure di sektor energi, yang menunjukkan bahwa di konteks perusahaan dengan dampak lingkungan besar, struktur EMS menjadi prediktor kuat. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Implementasi EMS menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungannya, termasuk emisi karbon, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas guna menjaga citra positif di mata stakeholder. Selain itu, dari perspektif *stakeholder theory*, perusahaan yang telah mengadopsi EMS lebih responsif terhadap tuntutan stakeholder dalam hal transparansi dan akuntabilitas lingkungan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan sistem manajemen lingkungan yang terstruktur dan tersertifikasi cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbon mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 14001 berfungsi sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mematuhi norma-norma lingkungan dan harapan masyarakat, sehingga tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan (Armono et al., 2024; Chariri et al., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rohmah & Nazir (2022); Jannah & Narsa (2021); Dewi & Kurniawan, (2020); Puteri & Inawati, (2023); Suherman & Kurniawati (2023) menyatakan bahwa sistem manajemen lingkungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuka akses terhadap lebih banyak peluang investasi. Bertentangan dengan penelitian Linda & Shanti (2022) perusahaan yang sudah lolos sertifikasi dan memiliki sertifikasi ISO 14001 belum termotivasi untuk mengungkapkan emisi karbon di laporan berkelanjutannya karena merasa emisi karbon yang dihasilkan berada di bawah ambang batas.

Implikasi bagi manajemen perusahaan yaitu EMS tidak hanya mendorong akuntabilitas lingkungan, tetapi juga memperkuat positioning perusahaan di pasar yang semakin mengutamakan aspek environmental, social, and governance (ESG). Sedangkan bagi investor dan analis, keberadaan sertifikasi ISO 14001 dapat menjadi sinyal positif tentang komitmen perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan (ESG investing). Bagi regulator, temuan ini memberikan dasar empiris untuk mendorong adopsi standar manajemen lingkungan yang diakui secara internasional, serta merancang insentif bagi perusahaan yang secara sukarela mengimplementasikan EMS dan meningkatkan transparansi lingkungan.

5.2. Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian statistic pada table 4.11 bahwa Firm Size (Ukuran Perusahaan) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, serta nilai t-statistik sebesar 21,88699. Hal ini terbukti memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure. Nilai t-statistik yang sangat tinggi memberikan bukti yang sangat kuat bahwa ukuran perusahaan merupakan penggerak utama dari pengungkapan emisi karbon. Penelitian Dewayani & Ratnadi (2021) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Hasil ini menyimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon dapat diterima. Artinya, semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori legitimasi dan teori stakeholder, dimana perusahaan besar berada di bawah sorotan publik dan tekanan stakeholder (pemerintah, masyarakat, LSM, investor) yang lebih intensif. Untuk mendapatkan dan mempertahankan izin sosial serta legitimasi, perusahaan besar cenderung lebih responsif dengan mengungkapkan kinerja lingkungannya, termasuk emisi karbon, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingannya (Nastiti dan Hardiningsih, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Chariri et al. (2023) dan Armono et al. (2024); Fitriani & Sunarsih, (2024) perusahaan dengan aset dan skala operasi yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan sistem pelaporan yang komprehensif dan memandang pengungkapan sustainability sebagai investasi strategis untuk reputasi mereka. Hasil penelitian ini pun sependapat dengan Setiadi & Nurwati (2022) bahwa pengungkapan emisi karbon dapat menambah rasa kepercayaan para *stakeholder* kepada perusahaan dan implementasi pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan daya saing di pasar global (Gutama & Sisdianto, 2024). Namun bertolakbelakang dengan Sari & Pratama (2023) menemukan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan lingkungan tidak signifikan. Argumennya yaitu implementasi EMS dalam industri sangat terpolinasi seringkali memiliki dualitas: di satu sisi dapat benar-benar meningkatkan kinerja lingkungan, namun di sisi lain dapat dimanfaatkan sebagai instrumen *symbolic legitimacy* melalui praktik *impression management*.

Implikasi bagi manajemen perusahaan perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil perlu mulai mengembangkan sistem manajemen lingkungan dan pelaporan keberlanjutan untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saingnya di pasar global yang semakin menuntut transparansi ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Bagi pemerintah dan regulator dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendorong transparansi lingkungan, terutama pada perusahaan berskala besar yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Kebijakan seperti kewajiban pelaporan emisi karbon, insentif bagi perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan baik, serta penguatan penerapan *sustainability reporting framework* dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Bagi investor dan masyarakat, tingkat pengungkapan emisi karbon dapat dijadikan indikator dalam menilai komitmen dan risiko keberlanjutan suatu perusahaan.

5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Carbon Emission Disclosure

Berdasarkan table 4.11. hasil pengujian statistik kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0002 lebih kecil tingkat signifikansi 0,05, serta nilai t-statistik sebesar 3,839829. Hal ini menunjukkan kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure. Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon dapat diterima. Artinya, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Wulandari & Widianingsih (2022) yang menunjukan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Investor institusional memiliki kekuatan untuk menekan manajemen agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab lingkungan.

Hasil penelitian ini memperoleh dukungan teoretis yang kuat dari teori stakeholder. Teori stakeholder menjelaskan bahwa investor institusional merupakan

salah satu stakeholder yang sangat powerful dan memiliki tuntutan tinggi terhadap praktik ESG (Environmental, Social, and Governance). Banyaknya saham yang dimiliki institusional mendorong manajemen agar lebih transparan, termasuk dalam hal kinerja lingkungan, untuk melindungi nilai investasi mereka dalam jangka panjang. Serta adanya tekanan dari mereka memaksa perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sebagai bentuk responsibilitas dan untuk mempertahankan legitimasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Chariri et al. (2023) dan Armono et al. (2024) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional menjadi pendorong utama praktik pengungkapan berkelanjutan. Studi oleh Smith & Johnson (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi tidak hanya mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan tetapi juga informasi yang lebih berkualitas. Dan bertolak belakang Penelitian Chen et al. (2015) mengemukakan bahkan investor institusional pasif dan menghindari konfrontasi dengan manajemen dan tidak mendorong pengungkapan yang dapat menyoroti risiko operasional perusahaan. Alasan berikutnya yaitu tidak semua investor institusional homogen; beberapa mungkin lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek dan tidak memberikan tekanan yang cukup untuk pengungkapan sukarela seperti emisi karbon.

Implikasinya kepemilikan institusional merupakan pilar kunci dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Bagi perusahaan, temuan ini memberikan pesan penting bagi manajemen perusahaan bahwa keberadaan investor institusional bukan hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berperan sebagai pengendali tata kelola (*corporate governance*) yang efektif. Bagi regulator, pemerintah dan otoritas pasar modal dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memperkuat kebijakan yang mendorong keterlibatan investor institusional dalam pengawasan kinerja keberlanjutan perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas lingkungan suatu perusahaan.

5.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Berdasarkan table 4.11 hasil pengujian statistik bahwa komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t-statistik 11,84972 dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Carbon Emission Disclosure. Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa hipotesis keempat yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon diterima. Artinya, semakin banyak jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit maka semakin tinggi tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Sari (2023) yang menunjukkan Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Komite audit yang aktif melakukan rapat akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan lingkungan perusahaan. Kekuatan hubungan yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik mengindikasikan bahwa keberadaan dan efektivitas komite audit merupakan prediktor yang sangat kuat dalam mendorong transparansi pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Hasil penelitian ini memperoleh dukungan teoretis yang kuat dari teori stakeholder. Dari perspektif teori stakeholder menjelaskan bahwa komite audit membantu perusahaan dalam memenuhi tuntutan berbagai pemangku kepentingan akan akuntabilitas lingkungan dengan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan memadai dan kredibel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Armono et al. (2024) dan Chariri et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan Komite Audit yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi serta lingkungan menunjukkan tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi. Studi oleh Smith & Johnson (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas Komite Audit tidak hanya terkait dengan kuantitas pengungkapan, tetapi juga kualitasnya, termasuk penggunaan assurance eksternal dan kerangka pelaporan yang terstandarisasi. Namun, tidak sejalan dengan Chen et al. (2022) bahwa di beberapa negara berkembang melaporkan hubungan negative komite audit dengan pengungkapan emisi karbon karena lingkungan dengan tata kelola yang lemah,

Komite Audit mungkin lebih terfokus pada pengawasan keuangan tradisional dan mengabaikan aspek pengungkapan non-keuangan dan komite audit tidak memiliki keahlian spesifik di bidang lingkungan atau sebaliknya ketika tekanan budaya organisasi menghambat independensi komite audit.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memiliki Komite Audit yang independen dan berkompeten, terutama dalam bidang sustainability, agar pengawasan terhadap pengungkapan lingkungan lebih efektif. Bagi investor dan analis, keberadaan Komite Audit yang aktif dan berkualitas menjadi sinyal positif atas kredibilitas informasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) perusahaan. Sedangkan bagi regulator seperti OJK, hasil ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat pedoman tata kelola, misalnya dengan mendorong adanya keahlian sustainability dalam Komite Audit serta memperluas pengawasan hingga aspek non-keuangan.